

PROGRAM PENGADAAN SAPI UNTUK MASYARAKAT

Fajrul Hapzi

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: In the case of cattle procurement planning by opposition budget by striking Cows in Kampar regency budget. This study aims to analyze the planning of cattle procurement programs to get a picture of whether the procurement program is actually for the benefit of the community or elite. In addition, this study also aims to find the cause of failure of cattle procurement program 2014-2016. The result of the research is known that in the procurement of cattle done by Kampar regency government is aimed to realize Kampar Regency as the center of cow breeding, but in the implementation of the program reap failure and tend to benefit certain elites, besides the evaluation show that procurement program Cattle for the kampar district community have no clarity, resulting in rejection by the Kampar DPRD which considers the cattle procurement program not in accordance with the priority program for the community. The cause of rejection in the procurement of cattle by DPRD Kampar regency is cattle procurement program undertaken by the Government of the Kampar district does not comply with the rule of law and the terms of irregularities.

Abstrak: Dalam perencanaan pengadaan sapi terjadi aksi penolakan anggaran dengan mencoret anggaran Sapi di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan program pengadaan sapi untuk mendapatkan gambaran apakah program pengadaan sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat ataukah elite. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan penyebab terjadinya kegagalan program pengadaan sapi 2014-2016. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam perencanaan pengadaan sapi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kampar adalah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai sentral pembibitan sapi, akan tetapi dalam pelaksanaanny program tersebut menuai kegagalan dan cenderung menguntungkan elite-elite tertentu, selain itu evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa program pengadaan sapi untuk masyarakat kabupaten kampar tidak memiliki kejelasan, sehingga terjadi penolakan oleh DPRD Kabupaten Kampar yang menganggap program pengadaan sapi tidak sesuai dengan program prioritas bagi masyarakat. Penyebab terjadinya penolakan dalam pengadaan sapi oleh DPRD Kabupaten Kampar adalah program pengadaan sapi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan aturan hukum dan syarat terjadinya penyimpangan.

Kata Kunci: pengadaan sapi, program prioritas, penyimpangan

PENDAHULUAN

Terjadi sebuah fenomena politik yang menarik untuk dikaji menyangkut perencanaan pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Perencanaan pembangunan tersebut yakni saat diadakannya pembahasan RAPBD Kabupaten Kampar antara pemerintah dengan DPRD Kabupaten Kampar. Pembahasan yang berlangsung tanggal 08 Desember 2015 tersebut pada intinya menimbulkan kekisruhan karena Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar, sepakat untuk menolak anggaran pengadaan Sapi yang diajukan pemerintah yang nilainya mencapai Rp.122 Milyar. Alasan penolakan anggaran pengadaan Sapi ini karena Banggar melihat proyek itu tidak sesuai dengan aturan hukum, bahkan realisasi proyek sebelumnya 2014 dan 2015 juga tidak jelas.

Sistem pengadaan sapi di Kabupaten

Kampar diyakini merupakan sumber utama bagi kebocoran anggaran di daerah tersebut yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberikan sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan bagi rakyat miskin di Kabupaten Kampar. Kegagalan tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat kegagalan dalam sistem pengadaan dan adanya konflik kepentingan dalam badan organisasi pemerintah Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian mendalam mengenai program pengadaan sapi bagi masyarakat di Kabupaten Kampar dengan cara mencari faktor-penyebab kegagalan dalam pengadaan sapi di tahun 2016, sehingga kecurangan yang biasa terjadi pada sektor pengadaan sapi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dapat ditekan.

Persoalan pengadaan sapi apakah memang benar-benar mengacu pada kepentingan masya-

rakat dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengajuannya, atau apakah kebutuhan Sapi memang sudah tercantum dalam Musrenbang tingkat terendah (Desa/Kelurahan) yang kemudian dibahas pada Musrenbang tingkat berikutnya. Dalam pelaksanaan pengadaan sapi yang terjadi adalah aksi penolakan dari DPRD Kabupaten Kampar yang disebabkan beberapa faktor mendasar diantaranya adalah efektifitas sapi yang masih diragukan dapat menjadi pemecah permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kampar, selain itu adanya permasalahan akuntabilitas dari pelaksanaan sebelumnya dimana banyak sapi yang dijual demi keuntungan pribadi dan cenderung merugikan Pemerintah Daerah.

Dalam pengadaan sapi terjadi aksi penolakan anggaran dengan mencoret anggaran Sapi di Kabupaten Kampar ini menurut asumsi penulis adalah akibat belum maksimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara kedua lembaga ini (eksekutif dan legislatif) sebagai satu kesatuan atau *partner* kerja untuk kesejahteraan masyarakat Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar sebelum pengajuan anggaran mungkin tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu, sementara DPRD Kampar mungkin menilai ada kebutuhan lain yang mendesak ketimbang pengadaan Sapi. Pada tataran teoritis, pemerintah dalam pengadaan seharusnya perbaikan proses pengadaan dan penganggaran antara lain yang terkait dengan alur proses perencanaan dan penganggaran serta penyusunan dokumen pengadaan dan penganggaran harus konsisten. Terkait dengan hal itu maka kualitas proses dapat dinilai dari alur pengadaan dan penganggaran yang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: Penyusunan agenda *setting*, Penyusunan *policy formulation*, dan penyusunan *budgeting* serta keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dalam penganggaran pengadaan Sapi di Kabupaten Kampar yang telah melahirkan beragam polemik, karena berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh DPRD Kampar bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pembiayaan sapi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain masalah anggaran, distribusi sapi untuk masyarakat juga menuai kontroversi di lapangan. Sehingga Banggar

DPRD Kampar, kompak untuk menolak anggaran Sapi. Proyek itu tidak sesuai dengan aturan hukum. Bahkan realisasi proyek sebelumnya 2014 dan 2015 juga tidak jelas. Termasuk penerima bantuan hibah. Proyek yang tidak sesuai aturan tidak mungkin harus tetap dipaksakan untuk dimasukan. kejadian tahun 2015 adalah karena dari 1.200 ekor Pengadaan Sapi hanya 115 ekor yang dilaksanakan. Proyek sapi tersebut dinilai melanggar aturan oleh Pemerintah Provinsi Riau, karena syarat yang mendapat dana hibah dan bansos itu harus mempunyai Badan Hukum. Namun Badan Hukumnya tidak ada dan tidak mungkin untuk menabrak aturan. Jadi ada ketentuan mengenai kewajiban lembaga penerima bantuan dalam bentuk badan hukum, mengacu pada pasal 298 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal itu ditegaskan, belanja hibah hanya bisa diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penentuan kebutuhan dalam pengadaan sangatlah penting karena penentuan kebutuhan merupakan landasan kerja bagi pelaksanaan pengadaan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan kebutuhan dapat menimbulkan pemborosan dan kerugian, baik itu pemborosan waktu kerja, juga kerugian material berupa uang. Kerugian semacam itu sering terjadi dikarenakan kurangnya informasi mengenai persediaan barang yang diakibatkan kesalahan dalam perencanaannya. Ternak pokok tahun 2014 terdiri 115 ekor dimana sapi yang mati berjumlah 12 ekor, hilang berjumlah 8 ekor, sedangkan dijual petani berjumlah 79. Sehingga sapi yang tersisa saat ini adalah 16 ekor. Ternak pokok tahun 2015 terdiri 2050 ekor dimana sapi yang mati berjumlah 34 ekor, hilang berjumlah 74 ekor, sedangkan dijual petani berjumlah 1538. Sehingga sapi yang tersisa saat ini adalah 404 ekor.

Dari perbandingan tabel Rekapitulasi Perkembangan Ternak Sapi distribusi Sumber Dana APBD II Kabupaten Kampar tentang Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Ta. 2014 dan Ta. 2015 dapat diketahui bahwa jumlah sapi yang semula berjumlah 115 tersisa menjadi 16 ekor. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 jumlah sapi terdiri dari 2050 ekor dan

tersisa saat ini menjadi 404 ekor sapi. Dalam hal ini Pengadaan Sapi yang terjadi adalah bahwa pada tahun 2014 yang semula berjumlah 115 ekor mengalami kenaikan jumlah distribusi sapi dimana perkelompoknya mendapatkan 50 ekor sapi yang terdiri dari 40 ekor sapi betina dan 10 ekor sapi jantan dengan jumlah keseluruhan menjadi 2050 yang di distribusikan untuk 41 kelompok di seluruh kecamatan di Kabupaten Kampar. Karenanya pada tahun 2016 DPRD Kabupaten Kampar sepakat menolak penganggaran sapi oleh pemerintah daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. Program Pengadaan Sapi untuk Masyarakat di Kabupaten Kampar dilakukan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kampar, DPRD Kabupaten Kampar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bagaimana proses penyusunan rencana pembangunan tahunan yang dimulai dari struktur pemerintahan paling bawah, yaitu Kelurahan, dilanjutkan di tingkat Kecamatan dan pada akhirnya sampai di tingkat Kabupaten Kampar inilah yang akan ditelaah secara mendalam sehingga ditemukan jawaban penyebab penganggaran pengadaan sapi ini dilaksanakan dengan sinkronisasi dan koordinasi yang baik.

Program Pengadaan Sapi

Perencanaan Program Pengadaan Sapi

Perencanaan dalam Pengadaan Sapi di Kabupaten Kampar, khususnya sapi potong merupakan salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa daging, selain itu sapi potong juga bisa memberikan berbagai macam

kontribusi seperti pupuk dan sebagai ternak kerja. Dengan demikian pengembangan ternak sapi penting untuk ditingkatkan melalui pengembangan populasi sapi. Dalam rangka pengembangan sapi, peran masyarakat di pedesaan tidak dapat diabaikan. Mereka harus didukung karena untuk mengembangkan usahanya saat ini masih terkendala oleh modal dan keterampilan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kampar melalui program pengadaan sapi pada tahun 2014-2015 mengeluarkan suatu kebijakan yang terkait dengan pengembangan usaha ternak sapi bagi masyarakat, yaitu dengan cara memberikan bantuan sapi kepada masyarakat.

Ternak Sapi distribusi Sumber Dana APBD Kabupaten Kampar Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Ta. 2014 terdiri dari 5 Kelompok dimana 4 kelompok mendapatkan 25 ekor sapi betina sedangkan Desa Baru kecamatan Siak Hulu mendapatkan 15 ekor sapi betina, sehingga jumlah sapi ternak pokok terdiri 115 ekor. Pada tahun 2015 berdasarkan hasil Rekapitulasi Perkembangan Ternak Sapi distribusi Sumber Dana APBD II Kabupaten Kampar tentang Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Ta. 2015 terdiri dari 41 Kelompok dengan masing-masing kelompok mendapatkan 50 ekor sapi yang terdiri dari 40 ekor sapi betina dan 10 ekor sapi jantan dengan jumlah keseluruhan ternak 2050 ekor sapi.

Proses pengadaan sapi dilakukan oleh tim pengadaan ternak serta melibatkan ketua kelompok yang didampingi ketua tim teknis kabupaten. Spesifikasi ternak yang dibeli berbeda dengan ketentuan yang seharusnya. Harga hanya diketahui oleh tim pengadaan ternak dan penjual sehingga penetapan harga tidak transparan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa telah menenderkan proyek Pengadaan Sapi. Pemenang tender pun telah ditetapkan dan diumumkan pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proses lelang dimenangkan oleh CV. Candra Mukti dengan tawaran senilai Rp. 21.375.348.400. Dimana nilai pagu pakatnya sebesar Rp. 21.813.000.000 yang dianggarkan pada APBD Murni 2015.

Bahkan telah dilakukan penekanan kontrak 14 Agustus 2015. Penekanan kontrak itu menandakan proyek tersebut akan segera dimulai. Namun yang jadi pertanyaan, nilai proyek sesuai tender itu berbeda dengan hasil evaluasi Gubernur Riau terhadap Perubahan APBD 2015 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubri Nomor Kpts. 1038/VIII/2015. Dimana, pada hasil evaluasi Gubri, tertera besar anggaran Distribusi Hewan Ternak sebesar Rp. 27.147.515.500. Berbeda jauh dengan nilai kontrak hasil lelang yakni, Rp. 21.813.000.000.

Pelaksanaan Program Pengadaan Sapi

Pelaksanaan pengadaan sapi untuk masyarakat telah terjadi kegagalan pada pelaksanaan sebelumnya sehingga hal ini memunculkan ketidakjelasan bagi pengadaan sapi pada tahun berikutnya yang berujung pada penolakan oleh Banggar DPRD Kabupaten Kampar. Selain itu perusahaan pemenang tender tidak dapat memenuhi pengadaan sapi dan perusahaan tersebut tidak di denda dan tidak diberi sangsi yang di terapkan Dinas Pertenakan kepada perusahaan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kampar tampaknya belum berupaya agar anggaran pengadaan Sapi dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan 2015. Pemerintah Kabupaten Kampar memprotes Pemerintah Provinsi Riau yang mencoret anggaran kegiatan tersebut. Bupati Kampar meminta agar anggaran Pengadaan Sapi diloloskan dalam APBD Perubahan diperlihatkannya pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, FGD itu bertajuk Pelaksanaan Hibah Barang/Jasa di Riau.

Hasil evaluasi terhadap Rancangan APBD Perubahan 2015 yang ditetapkan oleh Gubernur Riau dalam Surat Keputusan Nomor Kpts.1038/VIII/2015 itu tidak memperbolehkan Pengadaan Sapi dianggarkan. Proyek itu diusulkan melalui hibah pada Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kampar. Pengadaan Sapi itu dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, diatur lebih jauh dalam Peraturan Pe-

merintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Pembagian hibah harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Anggaran Sapi itu dalam jumlah fantastis. Pada APBD Murni 2015, kegiatan itu dianggarkan sebesar Rp. 27,147 miliar lebih. Dalam APBD Perubahan, anggaran untuk kegiatan yang sama diajukan lagi sebesar Rp. 24,507 miliar. Terjadi penambahan mencapai 90,27 persen. Sehingga jumlahnya menjadi Rp. 51,654 miliar lebih.

Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan penyerahan hewan ternak kepada masyarakat/pihak ketiga tahun anggaran 2014 kepada kelompok ternak diantaranya: Kelompok Berkah Desa Aur Sati Kecamatan Tambang (25 Betina), Kelompok Tani Ternak Panglimo Khotib Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar (25 Betina), Kelompok Tani Ternak Sapi Usaha Bersama Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang (15 Betina), Kelompok Tani Ternak Sapi Sepakat Jaya Desa Baru Kecamatan Siak Hulu (25 Betina), Kelompok Sapi Kayu Aro Manunggal Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara (25 Betina) dengan anggaran Rp. 11.035.000.000 dan realisasi Rp. 1.034.942.500

Evaluasi Program Pengadaan Sapi

Evaluasi program pengadaan sapi untuk masyarakat Kabupaten Kampar diketahui dari Surat Keputusan Gubernur Riau tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Perubahan APBD Kampar 2015 telah diterima DPRD Kampar yang isinya adalah penolakan pengadaan sapi untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Sekretaris Daerah menyerahkan SK tertanggal 14 Agustus 2015 itu ke Badan Anggaran dan setelah menerima SK itu, Banggar langsung menggelar rapat bersama Sekda Zulfan Hamid dan jajarannya. Rapat itu menghasilkan lima poin kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk saran atau rekomendasi dari DPRD. Hasil evaluasi yang paling disorot dalam pem-

bahasan tersebut adalah ihwal proyek pengadaan Sapi. Dimana Gubri menolak anggaran pengadaan sapi tersebut.

Penolakan itu dilakukan sesuai dengan SK Gubernur Riau yang mengamanatkan bahwa program pengadaan sapi akan menguntungkan individu-individu dan tidak bagi keseluruhan masyarakat. Untuk itu apabila pengadaan Sapi dibatalkan, maka anggarannya dapat dimasukan ke Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA). Hal ini dinilai, kecil kemungkinan anggaran Sapi tersebut dialokasikan untuk kegiatan lain. Kalau dialokasikan ke yang lain, berarti harus bahas APBD Perubahan kembali. Pemkab Kampar melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menganggarkan Pengadaan Sapi secara bertahap. Anggaran pembelian sapi juga turut dicurigai sejumlah pihak sebagai bagian dari upaya Jefry Noer untuk memperkaya diri dengan bisnis sapi, selanjutnya program ini juga berbau politik untuk kepentingan memuluskan Rahmad Jevari Juniardo merebut popularitas pada pemilihan Bupati kampar 2017 mendatang.

Kembali ke konstalasi politik anggaran di kampar, penolakan anggran papa minta sapi ini berasal dari kalangan mahasiswa dan sejumlah element masyarakat, puncaknya usulan Pemkab dalam KUA-PPAS 2016 dimentahkan oleh DPRD Kampar melalui rapat banggar. DPRD Kampar dipastikan menolak anggaran Proyek Pengadaan Hewan Ternak Rp. 122 miliar yang diusulkan Pemerintah kabupaten Kampar masuk dalam Rancangan APBD 2016. Namun Penolakan ini juga mendapat perlawanan dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, anggaran pengadaan hewan ternak khususnya Sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi perdebatan panjang dalam pembahasan KUA-PPAS 2016. Beredar kabar di kalangan dewan, bahwa anggaran untuk tunjangan perumahan mereka dikurangi Pemkab Kampar. Pengurangan uang tunjangan perumahan dewan disebut-sebut sebagai akibat dari penolakan anggaran Sapi tersebut.

Faktor Kegagalan Program Pengadaan Sapi

Faktor Efektifitas

Bantuan dana bergulir bagi peternak sebagian telah dicairkan dan sebagian lagi tengah

dalam proses verifikasi. Perencanaan dalam Pengadaan Sapi oleh pemerintah Kabupaten Kampar dilakukan untuk mewujudkan swasembada pembibitan sapi di Kabupaten Kampar, akan tetapi dalam perencanaan ini terdapat permasalahan, terutama penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar berupaya menjadi sentral peternakan sapi. Hal ini menuntut petugas peternakan dan pemangku kepentingan untuk serius baik dalam bekerja, penganggaran, dan keyakinan akan keberhasilan sebagai motivasi dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai sentral sapi Dinas Peternakan harus mempunyai terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjadi tolak ukur bagi pengembangan sapi masyarakat. Sehingga diharapkan dalam Pengadaan Sapi bagi masyarakat Kabupaten Kampar melalui Dinas Peternakan agar mampu melaksanakan program-program peningkatan Kesejahteraan masyarakat terutama peternak sapi dalam yang telah direncanakan dan mampu menjalankan segala tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta koordinasi dengan pihak-pihak dari instansi terkait.

Faktor Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengadaan sapi terjadi aksi penolakan anggaran dengan mencoret anggaran Sapi di Kabupaten Kampar hal ini terjadi adalah akibat belum maksimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara kedua lembaga ini (eksekutif dan legislatif) sebagai satu kesatuan atau *partner* kerja untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kampar sebelum pengajuan anggaran mungkin tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu, sementara DPRD Kampar mungkin menilai ada kebutuhan lain yang mendesak ketimbang pengadaan Sapi.

Faktor Transparansi

Transparansi dalam pengadaan barang dan

jasa adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat. Hal ini diketahui dari minimnya pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang sapi kepada semua calon penyedia barang yang berminat dan masyarakat yang membutuhkan sapi tersebut. DPRD Kampar sudah mempertanyakan kepada Satuan Kerja terkait untuk pengadaan sapi tersebut dan ternyata satuan kerja terkait belum siap untuk itu. Meskipun begitu Bupati Kampar sudah menerima jika DPRD Kampar menolak untuk memasukan pengadaan sapi itu di APBD Murni 2016. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui adanya ketidaksesuaian pemahaman antara pemerintah dengan DPRD Kabupaten Kampar terkait dengan program pengadaan sapi yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

SIMPULAN

Dalam perencanaan pengadaan sapi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai sentral pembibitan sapi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya program tersebut menuai kegagalan dan cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selain itu evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa program pengadaan sapi untuk masyarakat kabupaten kampar tidak memiliki kejelasan, sehingga terjadi penolakan oleh DPRD Kabupaten Kampar yang menganggap program pengadaan sapi tidak sesuai dengan program prioritas bagi masyarakat. Faktor penyebab terjadinya penolakan dalam pengadaan sapi oleh DPRD Kabupaten Kampar adalah faktor efektifitas dimana sapi bukanlah satu-satunya program prioritas Kabupaten Kampar, Faktor Akuntabilitas dimana dalam pengadaan sapi di Kabupaten Kampar, hal ini dapat diketahui dari tahun sebelumnya dimana permasalahan yang terjadi adalah banyaknya sapi yang dijual demi keuntungan pribadi dan cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu. Faktor Transparansi dimana dalam pengadaan sapi Kabupaten Kampar, hal ini diketahui dari minimnya pemberian informasi yang lengkap tentang aturan

pelaksanaan pengadaan barang sapi kepada semua calon penyedia barang yang berminat dan masyarakat yang membutuhkan sapi tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Assegaf Ibrahim, 1995. *Dictionary of Accounting*, Mario Grafika, Jakarta
- Affan Sulaeman, 1998. *Diktat Kebijakan Pemerintah*, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama Unpad – IIP
- Ahmad Santoso, 1998. *Kisi-Kisi Kebijakan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Bagong Suyatno. 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Kencana: Jakarta
- Bastian Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta
- Deno Kamelus. 2004. *Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif di Daerah*, GTZ, Jakarta
- Dean J. Champion, James A. Black. 2001. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama: Bandung
- Dennis Hoogerwerf, 2001. *Implementasi Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Diana Conyers, 1984. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Edi Suharto, 2004. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- M Irfan Islamy, 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soenarko, 2000, *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya
- Solichin Abdul Wahab,. 2001. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2002. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wibawa, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta
- Windarto Soewargono, 1997. *Kebijakan Publik*. Bandung: Persada Ilmu.